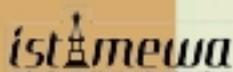




LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II

TAHUN 2022



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA
Jl. Kenanga No 26, Sambahegi Kidul, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta , Januari 2023
Kepala,

Edi Santoso, S.Pi, M.Si
NIP.19651017 198603 1004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	11
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	12
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	13
F. Pengungkapan Penting Lainnya	14
VI. Lampiran dan Daftar	15



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASILPERIKANAN YOGYAKARTA**

*Jalan Kenanga No 26 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
TELEPON (0274) 439390, FAXIMILE (0274) 439390*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keaman Hasil Perikanan Yogyakarta terdiri dari :Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta , Januari 2023
Kepala,

Edi Santoso, S.Pi, M.Si
NIP.19651017 198603 1004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta Per 31 Desember 2022 ini telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.156.615.000,- atau mencapai 70 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.224.889.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp.249.567.973,- atau mencapai 145.07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.181.342.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022 Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar RP.9.503.324.129 terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.343.384.154 ,Aset Tetap (neto) sebesar Rp.9.159.939.975,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.9.503.939.975,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 21.147.149,- dan Rp. 9.503.324.129.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus / deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.156.615.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.7.521.733.971,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(7.365.118.971,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan



sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(7.365.218.971)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.9.654.124.066,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(7.365.218.971-) ditambah dengan koreksi senilai Rp.,00 dan Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 1.569.107.616,-Koreksi Aset Tetap/ Non Revaluasi Rp.0 Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.7.193.271.885,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 9.482.176.980,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALAIN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	224,889,000	156,615,000	69.64	249,567,973
JUMLAH PENDAPATAN		224,889,000	156,615,000	69.64	249,567,973
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4,565,444,000	4,558,662,429	99.85	4,642,575,998
Belanja Barang	B.4	2,808,978,000	2,788,229,706	99.26	2,995,833,972
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	245,550,397
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		7,374,422,000	7,346,892,135	99.63	7,883,960,367

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

. NERACA

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMAN HASIL
PERIKANAN YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah)**

ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar di Muka(prepaid)	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.9	-	-
Persediaan	C.10	343,384,154	275,566,741
Jumlah Aset Lancar		343,384,154	275,566,741
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5,693,266,000	5,693,266,000
Peralatan dan Mesin	C.15	6,415,313,522	6,732,204,956
Gedung dan Bangunan	C.16	2,624,428,000	2,624,428,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	9,980,000	9,980,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	49,467,000	49,467,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5,849,119,812)	(5,712,499,436)
Jumlah Aset Tetap		8,943,334,710	9,396,846,520
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	968,000	968,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(968,000)	(968,000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		9,286,718,864	9,672,413,261
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	21,147,149	18,289,195
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21,147,149	18,289,195
JUMLAH KEWAJIBAN		21,147,149	18,289,195
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	9,265,571,715	9,654,124,066
JUMLAH EKUITAS		9,265,571,715	9,654,124,066
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9,286,718,864	9,672,413,261



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALAIN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	156,615,000	249,567,702
JUMLAH PENDAPATAN		156,615,000	249,567,702
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4,558,662,429	4,642,575,998
Beban Persediaan	D.3	129,884,218	98,189,772
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,835,894,641	2,124,372,985
Beban Pemeliharaan	D.5	273,488,757	294,195,045
Beban Perjalanan Dinas	D.6	486,997,381	328,225,050
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	236,806,545	530,454,842
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		7,738,339,236	8,018,013,692
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,365,118,971)	(7,768,445,990)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus /Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.11	(100,000)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		100,000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			271
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,581,824,236)	(7,768,445,719)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,365,218,971)	(7,768,445,719)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	9,654,124,066	9,765,398,591
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,581,824,236)	(7,768,445,719)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		7,193,271,885	7,657,171,194
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(388,552,351)	(111,274,525)
EKUITAS AKHIR	E.5	9,265,571,715	9,654,124,066

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta

Dasar Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Kenanga No 26 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta berkomitmen dengan :

Visi "Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman dan Terpercaya.

Misi "Mewujudkan Produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

"Mewujudkan pengolahan Sumberdaya Kelautan & Perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama penyakit ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang & dibatasi .

"Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang

sejahtera, maju, mandiri, melalui pola Konsumsi Ikan Yang Bermutu serta budidaya ikan yang jelas bebas dari Hama & Penyakit ikan .

Mengacu pada tugas, fungsi pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta **Yakni :**

Tugas Pokok

Melaksanakan pencegahan masuk & tersebarnya hama penyakit ikan karantina (HPIK) Ke/Di/Keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ,serta penerapan system manajemen mutu baik dipintu masuk/ keluar wilayah administrative Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan darisuat area ke area lain di dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Indonesia
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebar nyadari HPI dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan tujuan.
3. Pelaksanaan tindakan Karantina terhadap media pembawa media pembawa HPIK .
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan.
6. Pelaksanaan Inspeksi terhadap unit pengolahan ikan dalam rangka Sertifikat penerapan program Manajemen Mutu
7. Pelaksanaan Survailen HPIK ,Mutu dan keamanan hasil perikanan
8. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan ,Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

9. Pelaksanaan pengujian HPIK , Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
10. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu pada Laboratorium pelayanan operasional.
11. Pembantu Koreksi Media Pembawa dan/atau HPIK
12. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Perkarantina Ikan Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kebijakan Mutu Dan Aturan Kantor Untuk Pengguna Jasa Dan Pihak Ketiga :

Menjamin Kesehatan ikan ,Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Adalah suatu kebijakan Otoritas kompeten Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dengan Keteladanan, Kebersamaan ,Dedikasi, Kerja Keras dan Disiplin, Berdasarkan Kaidah Profesionalisme.

1. Memastikan Pemenuhan Persyaratan untuk kepuasan pelanggan.
2. Menjamin Pengendalian Sistem Manajemen Kerja
3. Meningkatkan Dan Mengedepankan Kinerja disemua Lini secara berkelanjutan .

Kerjasama maupun Mou kepada pihak ketiga baik mitra/Bank Persepsi/ stake holders antara lain :

- Kerjasama dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk
- Kerjasama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.
- Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta memiliki SDM yang berjumlah 54 Orang yang terdiri dari :

- PNS : 36 Orang - Office Boy : 2 Orang
- Non PNS : 14 Orang

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing .

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPIM Yogyakarta adalah sebagai berikut

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang

dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui bendahara Pengeluaran , pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan .

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

-
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Perperalatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik) Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	156,615,000	249,567,973
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	156,615,000	249,567,973
Belanja		
Belanja Pegawai	4,652,055,000	4,642,575,998
Belanja Barang	3,006,889,000	2,995,833,972
Belanja Modal	245,558,000	245,550,397
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	7,904,502,000	7,883,960,367

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan
Rp.156.615000,

-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.156.615.000,- atau mencapai 70 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.224.889.000,- Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Jasa.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	224,889,000	156,615,000	69.64
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	224,889,000	156,615,000	69.64

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2022 sebesar Rp.156.615.000,- dari Estimasi Pendapatan Sebesar Rp. 224.889.000,-

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	249,567,973	156,615,000	1.59
Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah	249,567,973	156,615,000	1.59

Realisasi

Belanja Negara

Rp.7.346.892.135

,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 7.883.960.367,- atau 99.74 % dari anggaran belanja sebesar Rp.7.904.502.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4,565,444,000	4,558,662,429	99.85
Belanja Barang	2,808,978,000	2,788,229,706	99.26
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	7,374,422,000	7,346,892,135	99.63
Pengembalian	-	-	-

Realisasi Belanja Periode TA 2022 mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Beberapa anggaran kegiatan tidak dapat terealisasi seperti belanja perjalanan dikarenakan adanya wabah corona, sehingga kegiatan dilakukan melalui zoom.
2. Adanya refocusing anggaran untuk belanja dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk dana COVID.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4,558,662,429	4,642,575,998	99.41
Belanja Barang	2,788,229,706	2,995,833,972	94.07
Belanja Modal	-	245,550,397	99.84
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	7,346,892,135	7,883,960,367	97.54

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp.4.558.662.429

,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.558.662.429,- dan Rp.4.642.575.998,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,377,086,346	2,527,470,494	(5.95)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2,024,481,083	1,982,793,204	2.10
Belanja Lembur	157,095,000	132,312,300	18.73
Jumlah Belanja Kotor	4,558,662,429	4,642,575,998	(1.81)
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	4,558,662,429	4,642,575,998	(1.81)

Belanja

Barang

Rp.2.788.229.70

6

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.788.229.706,- dan Rp. 2.995.833.972 Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan (26.72) dari Realisasi Belanja Barang TA 2022 Hal ini disebabkan mengalami kenaikan pagu anggaran ditahun 2021

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	590,506,000	734,187,250	(19.57)
Belanja Barang Non Operasional	140,084,102	223,090,461	(37.21)
Belanja Jasa	261,199,915	308,389,655	(15.30)
Belanja Pemeliharaan	752,607,189	611,632,849	23.05
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	260,541,507	246,895,311	5.53
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	437,510,232	728,665,574	(39.96)
Jumlah Belanja Kotor	2,442,448,945	2,852,861,100	(14.39)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2,442,448,945	2,852,861,100	(14.39)

Belanja

Modal Rp.0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.00, dan Rp.00,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan

dibandingkan Realisasi Belanja Moda TA 2021 Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran pada kegiatan pengembangan gedung Laboratorium SKIPM Yogyakarta

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528,964,000	311,349,210	69.89
Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan			
Jumlah Belanja Kotor	528,964,000	311,349,210	69.89
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	528,964,000	311,349,210	69.89

*Belanja
Modal Tanah*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tidak ada penambahan aset tanah dikarenakan tidak ada pembelian tanah pada tahun 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Belanja **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Modal Peralatan & Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp.528.964.000 mengalami kenaikan 69,89 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp.311.349.210,-
Rp.528.964.000,- Hal ini disebabkan oleh banyak kebutuhan yang harus disediakan Stasiun KIPM Yogyakarta untuk mendukung keberhasilan dari tupoksi yang telah ditetapkan ditengah pandemi COVID

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	528,964,000	311,349,210	69.89
Jumlah Belanja Kotor	528,964,000		0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	528,964,000	311,349,210	69.89

Belanja **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Modal Gedung & Bangunan. Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.024.218.500 dan Rp.1.431.993.000. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2021 Hal ini disebabkan adanya koreksi barang milik negara hasil investarisasi dan penilaian kembali dari aplikasi SIMAN belanja modal gedung dan bangunan TA 2022
Rp. 3.024.218.500
0

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)
Jumlah Belanja Kotor	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2021 tidak mengalami perubahan / nihil.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

*Belanja
Modal
Lainnya Rp.
0,00,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

*Belanja
Bantuan
Sosial*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah masing-



Rp.0,00

masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Pada kantor Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya lebih kearah pengawawasan dan pencegahan penyakit karantina maka tidak ada kegiatan ataupun program bantuan social

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja bantuan sosial	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.00,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut

:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai Di Brankas	-	
Uang Di Rekening Bendahara		
Jumlah	-	

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas bendahara tahun 2020 Rp.0,00 dikarenakan semua penerimaan Negara langsung masuk ke kas Negara dengan menggunakan system MPN-G2 dan tidak menerima uang cash untuk pembayaran jasa karantina ikan.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	
	-	
Jumlah	-	

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan

Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB **4 Piutang PNB**

Rp.0,00

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00. dan Rp.1.371.988. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Pada Tahun 2020 terdapat piutang bukan pajak dikarenakan belum disetornya ke kas negara potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2021, dan penyetoran melalui pemotongan spm pada pembayaran tunjangan kinerja bulan januari 2020. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2022 dan 2021

Uraian	TH 2021	TH 2021
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	1,371,988
Jumlah	-	1,371,988

Bagian Lancar **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR

Rp.0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan

Rp.0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut;

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021

No	Nama	TH 2022	TH 2021
	NIHIL		
	Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
TPA
Rp.0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2022 dan 2021

No	Nama	TH 2022	TH 2021
1			
2			
3	NIHIL		
4			
5			
	Jumlah	-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan

Rp.0

Rp.0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA
2022 dan 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Rp.16.666.666,-

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.16.666.666,- dan Rp.17.083.333,- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	16,666,666	17,083,333
Jumlah	16,666,666	17,083,333

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2022 dan 2021*

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.85.644.832,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 85.644.832,- dan Rp.64.698.712,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:



Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	33,160,912	36,486,728
Barang untuk Pemeliharaan	6,822,900	4,636,950
Suku Cadang	130,000	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	7,180,064
Bahan baku	45,531,020	16,394,970
Jumlah	85,644,832	64,698,712

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp.0,00*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2021

No	Debitur	TH 2020	TH 2019
1			
2			
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4			
5			
6			
	Jumlah	-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2022 dan 2021

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.00,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp.5.693.266.000

,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.5,693,266,000 dan Rp.5.693.266.000,-. Ada kenaikan nilai tanah pada kantor Stasiun KIPM Yogyakarta. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	5.693.266.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2020	5.693.266.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2021

1	1,480	Jl. Kenangan No.26 Maguwoharjo Depok Sleman	5,693,266,000
Jumlah			5,693,266,000

Total aset tanah Stasiun KIPM Yogyakarta 1.480 m².

*Peralatan dan
Mesin*

Rp.6.485.526.759

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.6.485.526.759,- dan Rp.5.958.256.759, Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Aset Perolehan per 31 Desember 2022	6,485,526,759
Mutasi tambah:	
Hibah Barang	0
Penyitaan barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo Aset per 31 Desember 2022	6,485,526,759
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	6,485,526,759

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

❖ NIHIL

*Gedung dan
Bangunan*

Rp.3.024.218.500

,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 3.024.218.500,- dan Rp.1.431.993.000,- Mengalami penyusutan reguler semester I Tahun 2020 dan penyesuaian

nilai hasil inventaris asset dari KPKNL Kementerian Keuangan transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	
Mutasi tambah:	
Pengembangan gedung laboratorium	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Tidak ada transaksi penambahan Gedung dan Bangunan di kantor Stasiun KIPM Yogyakarta.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp.9.980.000,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.980.000, dan Rp.9.980.000,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	9,980,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	9,980,000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	9,980,000

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada aset jalan, irigasi dan jaringan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.49.467.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya

per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.49.467.000,00 dan Rp.49.467.000,00. Aset tetap tersebut berupa monografi, map, maket gedung Stasiun KIPM Yogyakarta.

Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	49,467,000
Mutasi tambah:	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	49,467,000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.5.632.514.547
,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing RP. (5.632.514.547) dan Rp.(5.712.499.436),-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2022

1	Tanah	5,693,266,000	0	5,693,266,000
2	Peralatan dan Mesin	6,415,313,522	4,971,470,926	1,443,842,596
3	Gedung dan Bangunan	2,624,428,000	280,582,836	2,343,845,164
4	Jaringan	9,980,000	9,319,864	13,173,136
5	Aset Tetap Lainnya	49,467,000	968,000	49,467,000
Akumulasi Penyusutan		14,792,454,522	5,262,341,626	10,105,729,465

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp.0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2022

Uraian	Nilai Perolehan
NIHIL	NIHIL
Jumlah	

Aset Lain-Lain
Rp.968.000,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.968.000,- dan Rp. 968.000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	968,000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2022	968,000
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	968,000

Aset Tetap yang tidak digunakan dijelaskan sebagai berikut:

- Dispenser
- Printer (Peralatan Personal Komputer)

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp
(968.000),-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.(968.000),- dan Rp.(968.000),- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tetap yang tidak digunakan	968,000	968,000	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	968,000	968,000	0
Jumlah	968,000	968,000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp.00,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.00,- dan Rp.00,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada

Pihak Ketiga

Rp.21.147.149,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.21.147.149,- dan Rp.17.968.577,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Langganan Listrik	16,976,520	untuk Bulan Desember
Belanja Langganan Internet	3,387,300	untuk Bulan Desember
Belanja Langganan TLP	783,329	untuk Bulan Desember
Total	21,147,149	

Pendapatan

Diterima di

Muka

Rp.0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima dimuka

Uraian	Jumlah
NIHIL	NIHIL
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2022 dan TA 2021*

Uraian	TH 2019	TH 2018
NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp.
9.482.176.980,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.9.482.176.980,- dan Rp. 9.654.124.066,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

**D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
OPERASIONAL**

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp.224.889.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.224.889.000,- dan **.,-** Rp.181.342.000,-. Pendapatan tersebut terdiri:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	224,889,000	181,342,000	24
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	224,889,000	181,342,000	24

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan sensor karantina ikan mengalami kenaikan di karenakan jumlah pengujian sampel laboratorium baik lalu lintas maupun non lalulintas.

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp.4.565.444.000.

-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.4.565.444.000,- dan Rp.4.652.055.000,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2,416,355,474	2,397,467,533	1
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,953,968,759	159,519,000	1,125
Beban Lembur	140,028,000	2,277,119,965	0
Jumlah	4,510,352,233	4,834,106,498	(7)

Beban

Persediaan

Rp.129.884.218

,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.129.884.218,- dan Rp.98.189.772,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	96,732,846	95,819,071	
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-		
Bahan Persediaan bahan baku	129,993,975	365,396,325	
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan		0	
Beban Persediaan Lainnya	-		0
Jumlah	226,726,821	461,215,396	(51)

Beban Barang

dan Jasa

Rp.1.835.894.641

,--

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.835.894.641,- dan Rp.2124.372.985,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta

beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	502,750,941	469,199,350	7.15
Beban penambah daya tahan tubuh	79,092,000	83,497,000	(5.28)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	8,636,100	12,027,800	(28.20)
Beban honor operasional satuan kerja	91,520,000	116,520,000	(21.46)
Beban barang operasional lainnya	58,115,700	52,203,600	11.33
Beban bahan	67,927,102	32,227,528	110.77
Beban honor output kegiatan	15,130,000	5,500,000	175.09
Belanja barang non operasional lainnya	35,487,000	25,500,000	39.16
Beban langganan listrik	201,510,956	204,468,310	(1.45)
Beban langganan telepon	11,410,639	11,177,191	2.09
Beban Langganan Daya & jasa lainnya	82,679,589	91,949,100	(10.08)
Beban sewa	117,236,667	132,416,667	(11.46)
Beban jasa profesi	36,350,000	50,150,000	(27.52)
Beban jasa lainnya	126,415,000	106,563,000	18.63
Beban aset Ekstrakontabel peralatan & Mesun	220,510,100	6,157,000	#####
Jumlah	1,676,311,794	1,559,419,479	7.50

Beban Pemeliharaan Rp.273.488.757,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 273.488.757,- dan Rp.294.195.045,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72,869,500	89,824,270	(18.88)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148,648,151	176,508,230	(15.78)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	
Beban Persediaan suku cadang	0	0	
Jumlah	221,517,651	266,332,500	(16.83)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.486.997.381
,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 486.997.381,- dan Rp.328.225.050,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang menurun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	288,357,975	180,230,905	59.99
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,550,000	51,564,000	3.85
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,965,600	24,050,000	-37.77
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	130,123,806	72,380,145	79.78
Jumlah	486,997,381	328,225,050	48.37

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Rp.0

merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta tidak mempunyai anggaran untuk diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	% NAIK (TURUN)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0.00
Jumlah	0	0	

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.236.806.545,-

Rp.236.806.545 dan Rp.530.454.842,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban penyusutan amortisasi	236,806,545	530,454,842	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp.(00)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.00, dan Rp.00,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.100

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan Peralatan Dan Mesin	94,107,666		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	94,107,666	0	

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out*

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.9.654.124.066

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.9.654.124.066,- dan Rp. 9.765.398.591,-

Defisit LO

Rp.7.365.218.971

,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.(7.365.218.971), dan Rp.(7.768.445.719,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
NIHIL	NIHIL
Jumlah	-

Selisih

*Revaluasi Aset
Tetap Rp.0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00,- dan Rp.0,00.

Koreksi Aset

*Tetap Non
Revaluasi Rp.0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.00,- dan Rp.0,00,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-

Lain Rp.0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri :

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
NIHIL	NIHIL
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas E.4 Transaksi Antar Entitas

Entitas

Rp.7.193.271.885

,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.193.271.885,- dan Rp. 7.657.171.194,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan dari Entitas Lain	7,193,271,885
Diterima ke Entitas Lain	156,615,000
Transfer Masuk	2,994,750
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	7,352,881,635

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022 DDEL sebesar Rp.1.470.983.881 sedangkan DKEL sebesar Rp.101.523.748

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.994.750,-

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. (385.000)

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		
3	Persediaan		
Jumlah			-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp.0,00

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL		Rp -
2			
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**

Rp.9.482.176.980

,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing – masing Rp.9.482.176.980,- dan Rp.9.654.124.066,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

NIHIL.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 112/MEN-SJ/KP.430/XI/2021 tanggal 17 November 2021 Terhitung Mulai tanggal 22 November 2021 Bapak Edi Santoso, S.Pi, M.Si, Telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta
2. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta No . 106/38.0/KPTS/XI/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Stasiun KIPM Yogyakarta Yaitu :
 - * M Taufiq Trisnajaya , S E , Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
 - * Halim Parnomo, A.Md Sebagai Penandatanganan Surat Perintah Bayar
3. Terdapat Revisi DIPA terakhir pada tanggal 21 Desember 2022 yang mengubah nilai pagu anggaran dari senilai Rp.

8.395.446.000 menjadi senilai Rp. 7.374.442.000,- .Adapun realisasi anggaran s.d 31 Desember 2022 senilai Rp. 7.260.828.564,- atau 99% dari pagu dengan realisasi belanja

4. Realisasi Belanja dalam rangka penanganan COVID -19 senilai Rp. 14.646.996,00 atau 99% pagu revisi senilai Rp.14.665.000,- dengan rincian :

Realisasi Anggaran Covid-19 Stasiun KIPM Yogyakarta

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN
521131	Belanja Barang Operasional Penanganan Covid -19	11,165,000	11,146,996	99.84
522192	Belanja jasa Penanganan Covid -19	3,500,000	3,500,000	100
JUMLAH BELANJA		14,665,000	14,646,996	99.88

5. Terkait dengan penyajian Laporan Keuangan dan penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2022 tingkat Stasiun Karantina Ikan Yogyakarta yang berakhir 31 Desember 2022 , terdiri pembelian Hand sanitizer, Masker, APd dan Layanan Lisensi Aplikasi Video Conference.
6. Terdapat BMN rusak Berat senilai Rp. 318.838.434 telah diproses pengajuan ke KPKNL menunggu proses lelang
7. Terdapat persediaan senilai Rp. 343.383.154, berupa barang konsumsi senilai Rp. 17.039.777 bahan untuk pemeliharaan senilai Rp. 856.300.00,- dan bahan baku senilai Rp. 325.488.077.
8. Terdapat Utang Pihak ketiga berupa senilai Rp. 21.147.149,- berupa tagihan listrik , Air dan Telepon Bulan Desember 2022



Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
PMK 232 Tahun 2022

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta
